



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM),

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA

PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) SATUAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa nama-nama dan jabatan yang tertera pada kolom 5 sampai dengan kolom 10 dari daftar lampiran Keputusan Menteri ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( );
  6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

- KESATU:
- a. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 5 dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.
  - b. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 6 dalam lampiran keputusan Menteri ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.

- c. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 7 dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.
- d. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 8 dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.
- e. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 9 dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.
- f. mengangkat pejabat yang namanya tertera pada kolom 10 dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja yang tertera pada kolom 3 dalam Lampiran yang sama.

KEDUA:

- a. KPA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA);
- b. PPK mempunyai tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- c. PP-SPM mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada KPA;
- d. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan kewenangan menerima, menyimpan, menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening Kas Negara dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja;

- e. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan atas tagihan, menatausahakan, dan menyelenggarakan pembukuan transaksi yang bersumber dari uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

**KETIGA:** KPA mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan dengan mengikuti ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah untuk disampaikan kepada PA secara berjenjang sesuai ketentuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT:**
- a. kepada para pejabat dalam organisasi Satuan Kerja yang namanya tertera pada kolom 5 sampai dengan kolom 10 daftar lampiran Keputusan Menteri ini yang sengaja atau karena kelalaiannya yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja diberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. kepada para pejabat dalam organisasi Satuan Kerja yang dimaksud pada huruf a yang karena tindakannya dan/atau karena kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian bagi Negara, selain sanksi administratif juga dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut:
    - 1) Sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    - 2) Sanksi Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - 3) Sanksi Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

- 4) Sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**KELIMA:** Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

**KEENAM:** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- c. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Perbendaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**S A N U S I**

**NIP. 196412011985031001**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	09201.1.418135	Sekretariat Kemenpora	Jakarta III	Sekretariat Kemenpora					
		KPA		Sri Wahyuni, ST., M.Sc./197109071996032001					
		Bendahara Pengeluaran						Febtiamulia Kusumasari, S.E., M.M/198202062010122001	



		Bendahara Penerimaan					Rosyifa Mursyida, SE., M.M/ 19880626201 0122001		
		Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga			Danny Armyrn, AK., M.M/ 196712131988031001				Teguh Suryanto, A. Md/ 198905202015 041002

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Rumah Tangga			Danny Armynt, AK, M.M/ 196712131988031001				Sary Ningsih, S.P/ 19840206200912 2002
		Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Rumah Tangga			Subroto, Ak. M.M., C.A, CRGP, QIA./ 196709271988031001				Siti Juwariyah/ 19731105200812 2001
		Bagian Rumah Tangga, Biro Keuangan dan Rumah Tangga			Subroto, Ak. M.M., C.A, CRGP, QIA./ 196709271988031001				Rokhayatun, SE/ 19690609200701 2001
		PPK pada Biro Perencanaan dan Organisasi			Mochammad Indra Perkasa, S.S./ 198512242009121001				
		BPP pada Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan							Sulamto/ 19800804200911 1001
		BPP pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi							Leny Kurnia, S.P.,M. Si/ 19820327200912 2001

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		BPP pada Bagian Sumber daya Manusia Aparatur Biro Perencanaan dan Organisasi							Ririn Sulistyarini, S.Sos/ 19701020199403 2006
		BPP pada Bagian Organisasi Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi							Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M./ 19860307201012 1002
		Bagian Humas, Biro Humas dan Hukum			Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H./ 197306062001122001				Adhitya Mahendra Risdiyanto / 19790402 200911
		Bagian Sistem Informasi, Biro Humas dan Hukum			Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H./ 197306062001122001				Daniel Sunda, A.Md./ 19890725201801 1001
		Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum			Ferdinand K. Tangkudung, S.H / 198703132010121003				Emir Hadi, S.H./ 198603082 018011002
		Bagian Tata Usaha, Biro Humas dan Hukum			Deden Dendi, S.Sos /19740221200003 1001				Muhammad Lathif, A. Md.M.I.D / 19930711201902 1001

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		PPK pada Staf Ahli dan Staf Khusus Kemenpora			Danny Armyn, AK., M.M./ 196712131988031001				
		BPP pada Staf Ahli dan Staf Khusus Kemenpora							Febtiamulia Kusumasari, S.E., M.M./ 19820206201012 2001
		PPK pada Inspektorat			Agus Widaryanto, Ak., M.M./ 196711281988031001				
		BPP pada Inspektorat							Sarah Nungky Jayanthi, S.E./ 19930108201902 2001
		PP-SPM Kesekretariatan				Ermin Watri S. Kom. M.Si/ 196503271991032002			
2	418137	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Jakarta III	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda					
		KPA		Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM/ 196306241988031002					
		Bendahara Pengeluaran						Hardiyanto, S.E., M.M. / 197604072002 121002	

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		PPK pada Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda			Esa Sukmawijaya, S.Pd./ 196607201988031012				
		BPP pada Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda							Ryan Jeremy Partogi Marpaung, A.Md.Ak. / 19890318201504 1001
		PPK pada Asdep Tenaga Peningkatan Sumber Daya Pemuda			Dr. H. Amar Ahmad, M.Si 197501291998031002				
		BPP pada Asdep Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda							Elvi Susanti S.IP/ 19811023200802 2001
		PPK pada Asdep Peningkatan			Drs. Arifin, M.M./ 196302231981111001				
		BPP pada Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda							Zubed Prihantoro/ 1968 01181989031001
		PPK pada Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda			Drs. Arifin, M.M./ 196302231981111001				

		BPP pada Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda							Jumadi/ 19690613199203 1001
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		PPK pada Asdep Peningkatan IPTEK dan IMTAQ			Drs. Zainal Aminin, M.Pd., M.Si./ 196611301991031006				
		BPP pada Asdep Peningkatan IPTEK dan IMTAQ							Yossi Ahmad Falah, S.Sos.I., M. Kesos/ 198405282009121002
		PPK pada Asdep Peningkatan Kreativitas			Abdul Muslim, S.Pd., M.Si./ 1980070120031210				
		BPP pada Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda							Mozart Malik Ibrahim/ 198308122009 111002
		PP-SPM				Ignatius Arwan Yunaedi, SE/ 197006282007011001			
3	418138	Deputi Pengembangan Pemuda	Jakarta III	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	-				
		KPA		Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A./ 197605312000121002					
		Bendahara Pengeluaran						Abdul Latif, S.KM/ 198408 282009121001	

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		PPK pada Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda			Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si/ 198202202009011006				
		BPP pada Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda							Ruli Giri Kusumaningtya S.Pd, M.A../ 198609032010 122002
		PPK pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			H. Ibnu Hasan, S.Pd, M.Pd/ 196604141989031001				
		BPP pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda							Umriansyah, S.E./ 1983040420091110 02
		PPK pada Asdep Kewirausahaan Pemuda			Drs. Imam Gunawan, MAP /196202071990031001				
		BPP pada Asdep Kewirausahaan Pemuda							Syhabuddin Al Tapsi, SP/ 19900831201504 1001



		PPK pada Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			Drs. Imam Gunawan, MAP /196202071990031001				
		BPP pada Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan							Rina Yulistiarini, S.T., M.Pd/ 19740704200812 2002

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/ NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/ NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/ NIP	Pengeluarn Nama/ NIP	
		PPK pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			Andi Susanto, S.STP, M.Sc/ 197905131997111001				
		BPP pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda							Angrelia Dwi Pramestisari/ 19820501200903 2006
		PPK pada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			Drs. Wisler Manalu, M.M. / 196302081989031002				
		BPP pada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda							Annisa Eldina Larasati, S.IP/ 19910429201902 2001
		PP-SPM				Yulia Mahmuddin, SAP, MAP/ 198408282009121001			

4	418139	Deputi Pembudayaan Olahraga	Jakarta III	Deputi Pembudayaan Olahraga					
		KPA		Dr. Raden Isnanta, M.Pd/ 196510111991121001					
		Bendahara Pengeluaran						Kasdi., SE/ 197708112014 021002	

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/ NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/ NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/ NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/ NIP	Pengeluaran Nama/ NIP	
		PPK pada Sekretaris Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga			Hj.Suryati,S.Sos,M.Si / 196407171984032001				
		BPP pada Sekretaris Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga							Nastassia Octaviani, S.H., M.H./ 1984100320 14022001
		PPK pada Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan			Dr. Ary Moelyadi, M.Pd/ 196709141994121007				
		BPP pada Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan							Moses Eleazar Ferdinandus, S.IAN./ 1991032920150 41001
		PPK pada Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi			Drs. Maifrizon, M.Si./ 196805131995121005				
		BPP pada Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi							Isye Marisye, S.E, M.M/ 19770928201 0122001

		PPK pada Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraza			dr. Bayu Rahadian,Sp.Kj / 196401061991031001				
		BPP pada Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga							Luluk Hadiyanto, S.IA, M.O.R/ 19800608200912 1003

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Peogeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluarao Nama/NIP	
		PPK pada Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan layanan Khusus			Aris Subiyono, SH /196504271991031002				
		BPP pada Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan layanan Khusus							Abdul Latip, S.E, M.M/ 19670922200911 1001
		PPK pada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			Suyadi, S.IP / 197102141994031001				
		BPP pada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga							Sriyanti, S.T, M.S.i/ 19751231201012 2001
		PP-SPM				Andi Rustandi, S.Kom../ 196611161989011001			

5	418140	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Jakarta III	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga					
		KPA		Drs.Chandra Bhakti,M.Si/ 1962092219891210 01					
		Bendahara Pengeluaran						Faza Novrisal, S.H, M.H./ 198212032 015041001	

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/ PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/ NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/ NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/ NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/ NIP	Pengeluaran Nama/ NIP	
		PPK pada Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			Dra. Marheni Dyah Kusumawati, M.Pd/ 196508281991032002				
		BPP pada Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga							Novy Budiarti, SE/ 198211272009122001
		PPK pada Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga			Bambang Siswanto, S.Pd.,M.M./ 196603251990021001				
		BPP pada Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga							Arodtonafo Wiratama Hulu, S.IK, M.Pd/ 197809162010011025
		PPK pada Asdep Peningkatan Tenaga Organisasi Keolahragaan			Dr. Herman Chaniago, M.M./ 196404161989011001				



		BPP pada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan							Arsyan Hafiz Saputro, S.Pd./ 199210232018 011003
		PPK pada Asdep Industri dan Promosi Olahraga			Sri Wahyuni, ST., M.Sc./ 197109071996032001				
		BPP pada Asdep Industri dan Promosi Olahraga							Sofyan Anshory, S.E/ 198304092008 121004

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/ PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/ NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/ NIP	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/ NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/ NIP	Pengeluaran Nama/ NIP	
		PPK pada Asdep Olahraga Prestasi			Darmo Susilo, S.Kom., M.Si./ 196603251990021002				
		BPP pada Asdep Olahraga Prestasi							Budi Ariyanto Muslim, S.Pd, M.Pd/ 1981011720 09121001
		PPK pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			Dr. Ary Moelyadi, M.Pd/ 196709141994121007				
		BPP pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga							Arman Saputra Siregar, S.E., M.M. / 19820418200911 10012001
		PPK pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional			Dr. Surono, S.Pd., M.Pd./ 197005141998031002				
		BPP pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional							Agung Purwokusumo, S.Kom/ 19810924200912 001
		PP-SPM				Rita Suprianto, S.Sos., M.M./ 196401071989011002			

6	418141	UPT	Jakarta III						
		KPA		Tri Winarno, Ak., CA/ 196804291992021001					
		Bendahara Pengeluaran MUSOR, PPTIKON, PP- PON, RSON						Krisdianto, S.T. /198108012 010011013	

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
		Bendahara Penerimaan MUSOR, PPTIKON, PP-PON, RSON					Rosyifa Mursyida, SE., M.M/ 1988062 62010122001		
		PPK pada MUSOR			Een Ernawati, S.Pd., M.M/ 196702191989012001				
		BPP pada MUSOR							Mochamad Santoso, S.E./ 1971011520081 21001
		PPK pada PPTIKON			Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si/ 196506011991031002				
		BPP pada PPITKON							dr Efril Hardjanto Marpaung/ 19810411201101 1005
		PPK pada PP-PON			Mardiko Bagus Sumitro S. Pd MM/ 197908172010121001				
		BPP pada PP-PON							Agus Slamet Haryanto, S.E/ 1984050520091 21001
		PPK pada RSON			drg. Dessy Rosmelita, Sp.Perio, MARS/ 196012161994032001				

		BPP pada RSON						Purwanda Riskyanto, A.Md.Prs/ 199109102015 041001	
		PP-SPM				Windria Setiatama, S.S., M.Hum/ 19850715200912100			

No	Kode Satker	Nama Nomenklatur Satker/PPK	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	BENDAHARA		Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPI)
							Penerimaan Nama/NIP	Pengeluaran Nama/NIP	
7	499962	LPDUK	Jakarta III						
		KPA		Tri Winarno, Ak., CA/ 196804291992021001					
		Bendahara Pengeluaran pada LPDUK						Erwind Astanto, S.H/ 198104162015 041001	
		Bendahara Penerimaan pada LPDUK					Rizky Kartawijaya, S.Sos/ 198102072010 121002		
		PPK pada LPDUK			Dini Desriani, S.Sos., MAPS/ 198012302005012007				
		PP-SPM				Drs. Anwar, M.Si/ 196805251998021001			

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI